

PAPUA: Rekaman Dan Catatan Refleksi (16-31 Mei 2020)

1. Dalam laporan bulan pertama Mei (1-16 Mei), kami sudah mencatat keprihatinan banyak masyarakat dan/atau organisasi berkaitan dengan kegiatan DPR RI yang cenderung mengesahkan sejumlah rancangan RUU yang kontroversial. Dalam Kompas¹ tanggal 17 Mei diangkat lagi rencana sejenis berupa pembahasan serta pengesahan RUU Pemasarakatan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan, revisi Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan) lebih banyak membawa masalah ketimbang menawarkan solusi pemberantasan korupsi. Kekhawatirannya bahwa revisi UU ini memberikan keleluasaan pada narapidana kasus korupsi. Bahkan, napi korupter dipermudah untuk mendapat pembebasan bersyarat. Tiga hal diangkatnya: [a] terkait pemberian hak rekreasi yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 9 UU revisi; [2] ketiadaan syarat khusus bagi napi korupsi mendapat remisi cuti menjelang bebas maupun pembebasan bersyarat; dan [c] revisi UU ini tidak dilakukan dalam momentum yang tepat; di saat pemangku kepentingan fokus terhadap wabah Covid-19; DPR dengan sengaja tidak mengikutsertakan suara dan pandangan rakyat. Selain momentum tidak tepat, bertentangan dengan suara masyarakat, juga menjauhkan efek jera dari pemberantasan korupsi.
2. Dalam kerangka persiapan perayaan Idulfitri, beberapa instansi masih berdiskusi mengenai peluang untuk merayakan Idulfitri berjamaah di masjid atau di lapangan terbuka. Beberapa hari lalu Bupati Mimika telah memberikan izin kepada umat Muslim untuk mengadakan perayaan di lapangan terbuka selama maksimal 2 jam. Namun kemarin (19/5) izin itu sudah dibatalkan karena ada pelarangan dari MUI secara nasional untuk melaksanakan perayaan Idulfitri di masjid atau di lapangan terbuka. Di Merauke dibiarkan bahwa di luar Distrik Merauke, salat Idulfitri diperbolehkan di masjid². Kelak ada berita lain lagi bahwa MUI tidak melarang³, maka agak tidak jelas semuanya ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Ahmad Naistrau, di Manokwari, Senin 18/5/2020 mengutarakan berdasarkan hasil koordinasi bersama gugus Covid-19 dari 13 Kabupaten/kota di Papua Barat terdapat 7 zona merah, 5 zona kuning dan 1 zona hijau. MUI memutuskan supaya dalam 7 zona merah umat Muslim melaksanakan sholat Idulfitri di rumah masing-masing. Tujuh zona merah adalah: Kota Sorong, Kab Sorong, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan dan Fakfak⁴.
3. Akhir ini suatu lagu, "*Jangan Diam Papua*" yang diciptakan sekitar 7 tahun lalu mulai dipopulerkan sebagai 'teman seperjalanan para pejuang'. Awalnya lagu ini dibuat oleh Yab Sarpeto untuk aksi solidaritas Tambrau 2013. Waktu itu aksi solidaritas diadakan puluhan mahasiswa di Yogya untuk mengisahkan kenyataan gizi buruk dan busung lapar di wilayah asalnya para mahasiswa. Di Distrik Kwoor, Kab Tambrau, puluhan orang mati akhir tahun 2012; kebanyakan anak dan perempuan. Pada saat aksi diadakan 300 orang di distrik itu dinilai masih dalam keadaan 'gizi buruk dan busung lapar'. Lagu tersebut menjelaskan kepada publik luas, terutama masyarakat non-Papua, apa yang sebenarnya terjadi di Papua dan untuk melawan informasi yang lazimnya disajikan media resmi di Indonesia yang bersifat sangat eksotis dan kolonialis hingga menutupi penderitaan sebenarnya yang dialami bangsa Papua. Sejak saat itu lagu memang dinyanyikan pada sejumlah kesempatan, namun baru ini mendapat perhatian luas sewaktu dinyanyikan oleh 6 tersangka makar, tahanan politik Papua, yang disidangkan di Jakarta tanggal 13 Januari. Ternyata lagu menjadi 'teman perjalanan' bagi para pejuang ini, dan dapat mengungkap isi hatinya ditengah segala rasa tidak berdaya, ditengah tahanan,

¹ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/17/18313591/catatan-icw-atas-ruu-pemasyaraktan-hak-rekreasi->

² Lihat Cepos 22 Mei 2020, hlm 13 *Di Luar Distrik Merauke, Salat Ide Diperbolehkan di Masjid*.

³ Lihat <https://www.goriau.com/berita/baca/resmi-mui-tak-larang-sholat-idul-fitri-berjamaah-di-masjid-dan-lapangan.html>

⁴ Lihat <https://jubi.co.id/322723-2/mui-papua-barat-minta-umat-muslim-di-tujuh-daerah-ini-solat-id-di-rumah-saja>

penindasan, perampasan, diskriminasi dan kriminalisasi dsb⁵. Lagu ini dapat diakses di <https://youtu.be/7WVngz-LrTs>

4. Suatu insiden penembakan terjadi pada Minggu pagi hari (jam 02.00) di Sorong. Tepatnya, di Kilo 7, Kelurahan Mailangkedi, Distrik Sorong Utara. Korbannya, Yohanes Mara, masih dirawat di rumah sakit. Sewaktu korban bersama seorang teman berdiri dekat sebuah kios, tiba-tiba ada mobil yang melintasinya, menurunkan kacanya dan menembak dua kali. Pembela HAM, Yan Christian Warinussy, mendesak Kapolda Papua Barat untuk meneliti insiden ini dengan serius. Rupanya mereka lambat bereaksi sehingga Pa Yan masih mendorong keluarga korban untuk melaporkan insiden ini secara resmi. Dia juga meminta perhatian dari Komisi Nasional HAM untuk turun tangan⁶.
5. Menteri Luar Negeri Indonesia mendorong gencatan senjata, penghentian kekerasan, lebih-lebih di wilayah-wilayah konflik pada Dewan Keamanan (DK) di PBB. Inisiatif ini patut didukung. Walau demikian ada catatan kritis juga. Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar, menyatakan bahwa prinsip ini sangat baik, namun dia heran bahwa prinsip ini tidak diterapkan di negerinya sendiri. Ternyata situasi di Papua kurang dinilai sebagai 'wilayah konflik' walaupun ada ribuan pasukan yang sedang beroperasi di wilayah itu. Dengan kata lain, boleh dorong pihak eksternal, namun kurang pas kalau di rumahnya sendiri 'konflik dibiarkan'⁷. Memang muncul tanda tanya dan kebingungan.
6. Menurut berita dalam Jakarta Post⁸, Freeport akan merampingkan 'pasukan karyawan' operasional pertambangan Grasberg berhubungan dengan Covid-19. Sejumlah karyawan telah terkena virus dan ada 3 orang meninggal dunia. Karyawan-karyawan kontraktor semua dikembalikan kepada kontraktornya dan proyek-proyeknya ditunda, sedangkan karyawan yang masuk dalam 'kategori rentan' juga dijauhkan dari operasi pertambangan. Namun jurubicara PT Freeport, Pratma, mencatat juga bahwa 'output pertambangan' tidak akan menurun. Dia kurang jelas dalam memberikan angka berapa besar jumlah karyawan dipertahankan untuk menjalankan operasinya pertambangan, yang lazimnya memakai sekitar 25.000 karyawan. Sementara waktu jumlah yang 'terkena virus positif' di Kab Mimika sudah mencapai 150, diantaranya adalah 102 kasus di Tembagapura, tempat tinggalnya para karyawan pertambangan Grasberg bersama keluarganya. Pratama tidak menjelaskan angka tepat mengenai berapa banyak karyawan de facto sudah terkena virus atau dalam isolasi dan/atau perawatan. Dia juga menyatakan bahwa Freeport tidak akan menutup pengoperasinya karena hal demikian sangat merugikan dan akan menempatkan para karyawan dalam bahaya.
7. Polda Papua telah menangkap seorang pemuda yang menyusun suatu gambar yang menunjukkan Presiden Jokowi yang memakai topi bermotif "Bintang Kejora". Gambar itu disebarluaskan melalui media sosial. Dan rupanya juga ada tulisan seperti: "...sering punya ide gila untuk kasih kacau dan hancurkan Indonesia tujuan saya ingin membuktikan kepada dunia bahwa persoalan Papua merdeka bukan segelintir orang Papua yang ingin merdeka tetapi ini rakyat bangsa Papua Barat yang ingin memisahkan diri dari NKRI". Dia seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Pemuda ini ditangkap di Kawasan Pasifik Indah Pasir Dua, Distrik Jayapura Utara, tanggal 1 Mei. Sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Perbuatan ini melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 45a, Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 ... tentang informasi dan transaksi elektronik", kata Kabid Humas Polda Papua⁹.
8. Tim pengacara 17 terdakwa kasus kerusakan Jayapura mengambil langkah lanjut, yakni: mohon kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Walau sudah divonis 'ringan' dan sekarang sudah bebas, tim pengacara tetap berpendapat bahwa sebenarnya mereka semua perlu divonis 'bebas murni' karena kesalahan mereka tak terbukti. Maka mohon kasasi. Langkah ini juga diambil bukan semata-mata memperjuangkan tegaknya hak normatif anak-anak

⁵ Lihat <https://suarapapua.com/2020/05/18/7-tahun-jangan-diam-papua-dari-jalanan-hingga-nyanyian-tapol-papua/>

⁶ Lihat <https://suarapapua.com/2020/05/19/polda-papua-barat-didesak-tangkap-otk-yang-tembak-yohanis-marir/>

⁷ Lihat <https://suarapapua.com/2020/05/18/negara-dinilai-dorong-gencatan-senjata-tanpa-lihat-realita-di-papua/>

⁸ Lihat Jakarta Post, 18 Mei 2020

⁹ Lihat <https://m.detik.com/news/berita/d-5022087/polda-papua-tangkap-mahasiswa-yang-posting-foto-jokowi-pakai-topi-bintang-kejora>

OAP (Orang Asli Papua) tetapi sebuah upaya untuk memperjuangkan harkat dan martabat OAP¹⁰.

9. Kapolda Papua bersama Pangdam XVII/Cendrawasih mengadakan kunjungan ke Timika. Soal inti: keamanan di wilayah operasional PT Freeport. Mereka mengecek kesiapan Posko PAM Terpadu dan mengadakan pertemuan dengan manajemen PT Freeport. Menurut mereka, segala kepengurusan pengamanan perlu ditingkatkan demi kelancaran operasional PT Freeport. Frekwensi patroli dinaikkan, pemasangan alat sensor dan CCTV dilakukan dan membangun beberapa pos TNI-POLRI. Sepintas lalu juga disebutkan suatu SK Menkopolhukam yang isinya menunjukkan Kapolda Papua sebagai Kaops (kepala operasional) Penegakan Hukum di Provinsi Papua dan Pangdam XVII/Cendrawasih sebagai Wakil Kaops Penegakan Hukum¹¹.
10. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) mengatakan bahwa 52 % anak sekolah di Papua tidak belajar selama pandemi Covid-19. Dari hasil data LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Papua menjadi jelas bahwa hanya 48% proses pembelajaran di rumah sedang berjalan¹². Kepala DPPAD juga menyatakan bahwa sekolah yang ada di daerah Zona Hijau bebas Covid-19 boleh saja melakukan Proses Belajar Mengajar (PBM) di sekolah, asalkan ada ketetapan dari Pemkab setempat bahwa wilayahnya bebas Covid-19¹³.
11. Seorang ditemukan tertembak di wilayah operasi Freeport (21/05/2020). Tempatnya di Km 61. Korban ditemukan dalam keadaan tertembak dan terluka berat dan dibawa ke rumah sakit, namun tidak dapat ditolong. Kurang jelas kenapa ditembak dan ditembak oleh siapa¹⁴. Wilayah kejadian adalah wilayah yang 'terlarang untuk tenaga non-Freeport' namun sering diramaikan oleh para pendulang emas. Kapolda Papua sudah mengingatkan masyarakat supaya jangan berkeliaran di wilayah ini; dia juga memberi peringatan keras kepada para anggotanya untuk tidak membawa orang lain (pendulang) ke wilayah ini. Wilayah ini sedang menjadi 'medan operasi' baik TNI-Polri maupun TPNPB.
12. Suatu berita yang sangat mengganggu terdengar dari Kabupaten Intan Jaya. Menurut ceriteranya pada hari Jumaat (22/5/2020) dua tenaga medis yang sedang mengantar obat-obatan ke pos jauh, ditembak. Satu meninggal dunia, sedangkan yang lainnya sekarang dirawat di Rumah Sakit di Nabire; diapun dalam keadaan cedera yang sangat serius¹⁵. Sementara waktu ada saling menuding antara pihak polisi dan TPNPB. Pihak Polisi menuding bahwa pelaku penembakan adalah TPNPB. Sedangkan pihak TPNPB menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dalam kejadian ini dan menuduh ke pihak kepolisian. Bagaimanapun juga kejadian ini sangat memprihatinkan dan perlu dikutuk oleh segala pihak yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai martabat kemanusiaan.
13. Menjelang berakhirnya kurun waktu berlakunya OTSUS, topik Otsus makin menjadi topik pembahasan di pelbagai kalangan sosial masyarakat Papua. Dalam suatu diskusi seorang dosen pada Fakultas Teologi UKIP (Universitas Kristen Papua) di Sorong, Pdt Julian Anouw, menyatakan bahwa sebenarnya orang Papua asli tidak perlu Otsus; mereka bisa atur diri tanpa Otsus itu, karena de facto Otsus ini hanya menguntungkan orang non-OAP dan segelintir elite Papua saja¹⁶. Dia menilai Otsus berakhir atau tidak, tidak berdampak pada masyarakat asli Papua. Sebab, masyarakat asli Papua bisa hidup tanpa Otsus karena mempunyai sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup.

¹⁰ Lihat Cepos, 22 Mei 2020, hlm. 9, *17 Terdakwa Kasus Kerusuhan Jayapura ajukan kasasi ke MA*.

¹¹ Lihat Cepos, 22 Mei 2020, hlm 5 *Ke Mimika, Kapolda dan Pangdam Cek Situasi Keamanan*.

¹² Lihat Cepos, 22 Mei 2020, hlm 14 *52 Persen Anak Sekolah di Papua Tidak Belajar*.

¹³ Lihat Cepos, 22 Mei 2020, hlm 3

¹⁴ Lihat <https://news.detik.com/berita/d-5024553/kkb-kembali-tembaki-warga-di-tembagapura-papua-1-orang-terluka> dan <https://seputarpapua.com/view/kapolres-mimika-pelaku-penembakan-warga-di-mile-61-diduga-dilakukan-kkb-kali-kopi.html>

¹⁵ Lihat <https://suarapapua.com/2020/05/23/ini-kronologi-penembakan-dua-asn-petugas-medis-di-intan-jaya/> dan <https://jubi.co.id/tenaga-kesehatan-intan-jaya-dianiaya-pelakunya-tak-dikenal-papua/> dan <https://www.jakartapost.com/news/2020/05/24/opm-saya-tni-police-shot-medical-workers-in-papua.html>

¹⁶ Lihat <https://suarapapua.com/2020/05/22/dosen-ukip-sorong-oap-bisa-hidup-tanpa-otsus/>

14. Kaget juga. Setelah suatu kunjungan anggota DPRD (22/05/2020) pada RSUD Mimika di Timika menjadi jelas bahwa bertahun-tahun RSUD ini mendatangkan makanan untuk para pasien dari catering. Sangat mengherankan karena RSUD memiliki fasilitas dapur yang lengkap, dan praktik catering rupanya sudah berjalan selama beberapa tahun, dengan alasan bahwa 'tidak ada dokter gizi'. Alasan ini kurang kuat mengingat bahwa RSUD memiliki tenaga staf ahli gizi dan juga membayar tenaga dapurnya. RSUD Mimika sudah berdiri selama 10 tahun, dan merupakan salah satu Rumah Sakit rujukan untuk penanganan pasien terkonfirmasi positif Covid-19¹⁷.
15. Ternyata permainan politik tidak pernah ada henti-hentinya. Dalam suasana manapun, termasuk selama kurun waktu ancaman Covid-19, para politikus memanfaatkan segala tindakan serta kebijakan politik untuk menyuarakan pendapatnya dan meraih dukungan masanya. Kadang-kadang malahan muncul kesan bahwa ada gerakan untuk pelahan-lahan menurunkan Presiden dari tahtanya, entah berhubungan dengan kebijakan selama 'masa Covid-19', entah karena gagasan revisi sejumlah RUU, entah berhubungan dengan masalah lembaga asuransi nasional Jiwasraya ('Jiwasraya-gate'), dst. Sejumlah politisi sangat vokal sampai mantan Presiden SBY juga turut mengangkat lagi suaranya, lebih-lebih berhubungan dengan 'Jiwasraya-gate', yang menurut beliau cenderung dipakai untuk 'menargetkan sejumlah petinggi Negara', termasuk Presiden¹⁸. Juga Amin Rais yang akhir-akhir ini sangat vokal karena meninggalkan partainya (PAN) untuk mendirikan sebuah partai politik yang baru. Beliau juga menyinggung soal 'penurunan Presiden' dan mengungkapkan harapannya supaya Presiden dibiarkan dapat menyelesaikan seluruh periodenya sampai 2024¹⁹. Kami di Papua agak jauh dari 'power-game' (permainan kekuasaan) di Jakarta untuk memahaminya secukupnya, namun jelas segala berita 'power-game' ini tidak menambah pada ketenangan yang dibutuhkan demi penetapan kebijakan yang baik dalam suasana kritis sekarang ini.
16. *Tanggal 24 Mei 2020, Hari Raya Idul Fitri. Kami mengucapkan Selamat Merayakan Hari Idul Fitri kepada seluruh Umat Muslim. Semoga pesta kebersamaan, keikhlasan dan damai ini menjadi landasan semangat hidup kita bersama sehari-hari sepanjang tahun. Mohon Maaf Batin & Lahir.*
17. Pada Senin, 25 Mei 2020, seorang warga Hamadi menjadi korban semprotan oleh 'kanon air', milik Kepolisian Daerah Papua, saat melintas jalan Amphibi di Hamadi dalam rangka mengawasi 'pembatasan gerakan sosial' di wilayah Jayapura. Korban meninggal dunia setelah terpelanting membentur tembok akibat semprotan 'kanon air'. Menurut berita sekitar jam 17.00 sekelompok orang masih berkumpul di depan sebuah restoran walau sudah lewat jam pembatasan, yakni pukul 14.00. Setelah menerima berita ini Satgas Covid-19 berespons dengan menggerakkan 'kanon air' Polda Papua ke situ, dan kelompok itu diminta membubarkan diri. Karena respons kelompok tidak memuaskan bagi Satgas Covid kelompok disemprot dengan memakai 'kanon air' itu. Akibat satu orang meninggal dunia²⁰. Sangat perlu disesali bahwa tindakan Satgas Covid bisa sampai disitu. Sangat mengherankan bahwa 'kanon air' Polda Papua dikerahkan untuk mengatur 'kedisiplinan pembatasan gerakan'. Tidak ada masa yang berontak atau kerusuhan massif, hanya sekelompok kecil yang perlu ditegur/dibubarkan. Pemakaian 'kanon air' merupakan suatu tindakan yang sangat berlebihan (over-acting). Pengizinan pemakaian alat 'kanon air' ini perlu dijadikan bahan introspeksi Polisi Daerah dan alasan tindakan hukum pada anggota Satgas Covid.
18. Lima tahanan politik Papua di Jakarta, Surya Anta, Ambrosius Mulait, Charlesa Kossay dan Dano Anes Tabuni, akhirnya dibebaskan pada tanggal 26 Mei 2020. Mereka dituduh membuat 'makar' dan ditahan selama 9 bulan di penjara Salemba. Sedangkan satu teman lain, Ariana Lokbere, ditahan di penjara Pondok Bambu dan baru dibebaskan hari

¹⁷ Lihat <https://seputarpapua.com/view/punya-dapur-sendiri-rsud-mimika-malah-pakai-jasa-catering.html>

¹⁸ Lihat <https://www.wartaekonomi.co.id/read286676/sby-gak-perlu-turunkan-jokowi-sekelas-presiden-mungkin-gak-tahu-ada-penyimpangan-besar-di>

¹⁹ Lihat <https://hot.grid.id/read/182164876/sebut-rezim-sekarang-berat-sekali-amien-rais-semarah-marah-kita-pada-presiden-kalau-pak-jokowi-sampai-diturunkan>

²⁰ Lihat <https://jubi.co.id/semprotan-water-canon-satgas-covid-19-tewaskan-warga-papua-butuh-payung-hukum/>

berikutnya. Seminggu lalu, mereka pernah disiapkan mengikuti 'program asimulasi' (dibebaskan karena Covid-19) namun pada titik terakhir asimulasinya dibatalkan dengan alasan politik. Akhirnya dibebaskan murni karena masa vonnis tahanan sudah habis waktunya²¹. Selamat menikmati udara sejuk di tengah keluarga dan sahabat-sahabat Anda.

19. Di Amerika, Minneapolis seorang warga berkulit hitam, George Floyd, dibunuh – tidak dapat bernafas lagi karena leher ditindas oleh lutut petugas polisi selama 9 menit - saat dia ditangkap (26/5/2020). Pembunuhan brutal oleh petugas polisi ini memicu suatu ombak protes di seluruh Negara Amerika. Tidak mengherankan bahwa kelakuan polisi dikutuk secara luas oleh masyarakat nasional dan internasional, berkulit hitam maupun berkulit putih dan diharapkan akan menjadi suatu pelajaran penting pun untuk kita semua di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ternyata kebencian antar etnis, antar beda warna kulit, masih sangat mendalam dan sangat berakar dalam sikap dasar banyak orang. Kenyataan demikian terungkap dalam peristiwa seperti terjadi di Minneapolis. Di Papua kejadian ini juga tidak tanpa dampak. Dalam komentar seorang tokoh ULMWP, Markus Haluk, kejadian di Amerika sangat mudah dapat dikaitkan dengan sejumlah kejadian di Papua yang mirip²². Maka kejadian rasis ini di Amerika patut diangkat sebagai suatu seruan kepada kita juga di Indonesia untuk meninggalkan segala sikap kebencian, diskriminasi, peremehan, penghinaan antar etnis dan suku. Catatan kami. Kita semua lahir sebagai manusia yang seharga dan semartabat, dan misi kita semua di dunia ini adalah untuk saling menghargai dan bersama membangun suatu dunia yang ramah bagi sesama, apapun warnanya, apapun agamanya, apapun asal-usulnya. Seruan ini sekarang dikumandangkan di seluruh dunia melalui demo, kumpulan, protes, aksi dan ternyata dalam gerakan sedunia ini seluruh kesusahan Covid-19 kalah jauh pentingnya! Ternyata pertobatan serta penyembuhan kita menjadi orang yang saling menghargai dan menolak segala bentuk rasisme dan penindasan sangat mendasar dan jauh lebih dibutuhkan daripada apa saja! Semoga pelajaran serta pengalaman baru ini tidak dilalui sia-sia.
20. Diketahui bersama bahwa selama periode 'krisis rasis' (Agustus-September 2019) cukup banyak fasilitas umum dirusakkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk mendukung pembangunan kembali sejumlah fasilitas itu di Wamena dan di Jayapura. Ternyata proses itu sudah berjalan dan sebagian terbesar fasilitas itu sudah dibangun kembali. Di Wamena: Pasar Wouma 100%, Gedung KUA Kab Jayawijaya 100%, STISIP Amal Ilmiah Yapis 89%, 403 unit Ruko 88%. Di Jayapura: Gedung BLK Kelas II Abepura 100%, Gedung KPU 65%, dan Gedung Aula Majelis Rakyat Papua (MRP) 100%²³.
21. Menurut seorang peneliti pertanian Universitas Papua (UNIPA) lebih dari 2 juta warga Papua dan Papua Barat terancam kelaparan jika pengiriman logistik dari luar daerah, khususnya beras, terganggu pada masa pandemi Covid-19. Untuk mencegah hal itu sangat dianjurkan kepada semua warga yang berpeluang – ada tanah - untuk berkebudan massal, menanam bahan makanan supaya dapat mencukupi pangan secara mandiri. Pendapat demikian sangat diseriisi oleh Kepala Dinas dan Pangan Provinsi Papua, Samuel Seriw. Dia memohon 'Kota dan Kabupaten mensosialisasikan keprihatinan ini dan memanfaatkan pekarangan yang ada, terutama di desa-desa'²⁴. Maka, tidak mengherankan lagi bahwa Bupati Kab Jayapura secara konkrit mendorong kuat masyarakat untuk berkebudan dan menyatakan diri bersedia untuk membantu dengan bibit atau alat kalau perlu. Dia sangat memuji masyarakat yang sebenarnya sudah mulai bertindak kearah itu dan membuka kebun baru tanpa mencari bantuan khusus²⁵.
22. Apakah gaya bicara begini tidak memalukan? Peralnya, menurut *Kompas.com* Menkopolkam, Mahfud MD, menceritakan *meme* tentang virus corona yang ia peroleh dari Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. *Meme* tersebut

²¹ Lihat <https://tirto.id/4-tapol-papua-bebas-usai-jalani-masa-hukuman-di-rutan-salemba-fCS0>

²² Lihat <https://jubi.co.id/ulmwp-kekerasan-rasial-di-as-mengingat-kepada-kasus-rasisme-papua/>

²³ Lihat <https://jubi.co.id/kementerian-pupr-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-7-fasilitas-umum-di-jayapura-dan-wamena/>

²⁴ Lihat <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52661830>

²⁵ Lihat <https://seputarpapua.com/view/bupati-jayapura-galakkan-berkebudan-bagi-warganya.html>

menganalogikan virus corona selayaknya istri. "Judulnya itu dalam bahasa Inggris, *Corona is like your wife*. Corona itu seperti istrimu, ketika kamu mau mengawini, kamu berpikir kamu bisa menaklukkan dia, tetapi sesudah menjadi istrimu, kamu tidak bisa menaklukkan istrimu," kata Mahfud menceritakan dalam sambutannya di acara halalbihalal IKA UNS yang disiarkan di kanal YouTube Universitas Negeri Sebelas Maret, Selasa (26/5/2020). "Sesudah itu. Than you learn to live with it (kamu belajar untuk hidup bersamanya). Ya sudah, sudah begitu," kata Mahfud²⁶. Kapan kebudayaan gender yang benar menjadi milik dan dasar bicara para pejabat tinggi kita?

23. Dua warga Timika, kedua anggota KNPB, ditangkap (29/5/2020) karena muncul berita di *facebook* yang menyebutkan bahwa Kapolda Papua ada di belakang baik pembunuhan dua warga di Timika (insiden 13 April) maupun penembakan pada dua tenaga medis di Intan Jaya (insiden 22 Mei). Karena berita ini dinilai memberikan 'informasi palsu' dua orang ditangkap dan ditahan, dan dalam prosesnya satu, yang juga jurubicara KNPB Timika, malahan dilumpuhkan alias ditembak karena melawan²⁷. Sudah tentu berita palsu yang begitu mudah menuduh orang melakukan suatu kejahatan yang besar, pantas dikecam betul. Namun yang menjadi pertanyaan: apakah orang yang diduga ada di belakang suatu berita palsu tidak perlu didengar dulu kah sebelum ditangkap dan ditahan begitu saja? Cara lebih kemanusiaan diberlakukan ditempat lain, seperti sewaktu beberapa minggu lalu Pdt Socrates Nyoman dipanggil oleh Kapolda untuk menjelaskan tulisannya. Gaya yang sama diberlakukan di Jawa dimana beberapa kasus 'penghinaan' melalui penungkapkan opini secara publik diawali dengan panggilan untuk memberikan penjelasan di kantor polisi. Kenapa gaya bertindak terhadap beberapa orang Papua baru-baru ini – baik di Timika dan di Base G - yang diduga bersalah memberikan informasi palsu begitu berbeda dengan gaya tindakan yang diberlakukan di tempat lainnya, yang ternyata jauh lebih menghargai martabat setiap manusia?
24. Ternyata ada insiden penembakan lagi yang menewaskan seorang warga setempat, Yunus Sani. Penembakan ini terjadi di 'jalan trans' di wilayah perbatasan antara Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai, kampung Magatage. Kenapa penembakan ini terjadi kurang jelas. Menurut pihak Polisi ada seorang saksi, seorang dalam perjalanan pulang, yang menyatakan telah bertemu dengan kelompok kecil tiga orang yang mengaku mengadakan penembakan fatal itu dan menamakan diri 'tentara hutan'. Insiden masih dalam penelitian²⁸.
25. Nama Gubernur Provinsi Papua Barat sekarang disebut dalam suatu kasus korupsi. Ternyata Gubernur pernah memberikan 500 juta kepada Komisi yang berurusan dengan penyusunan Komisi KPU untuk Papua Barat periode 2020-2025. Gubernur berjuang supaya anggota Komisi KPU Papua Barat yang akan dipilih adalah orang asli Papua²⁹. Anggota DPRD Papua Barat sekaligus tokoh pemuda, Aloysius Siep, menilai bahwa berita ini keluar tanpa banyak landasan, karena yang bersangkutan, Gubernur, belum ditanya apa-apa. Maka, boleh jadi akan ada gejolak masyarakat yang tidak diinginkan³⁰. Menulis mengenai Gubernur provinsi Papua Barat, kami teringat bahwa selama sekitar satu setengah bulan tidak ada berita lagi mengenai keberadaan Gubernur provinsi Papua. Setelah meninggalkan Papua (15/04/2020) secara mendadak karena kesehatannya, tidak ada berita lagi. Aneh.....!!!
26. Berita baik dari Sorong. Empat tahanan politik yang berstatus 'terdakwa makar' – mereka ditangkap dan ditahan pada tanggal 19 Sept 2019 – dibebaskan. Ditangkap karena mereka berdemo menolak aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh '61 wakil Papua' dalam pertemuan dengan Presdiden Jokowi pada tanggal 10 Sept 2019. 'Kelompok 61' itu tidak diakui sama sekali sebagai perwakilan rakyat Papua, namun dinilai sebagai suatu

²⁶ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/07482351/mahfud-dapat-meme-corona-is-like-your-wife-dari-luhut-apa-artinya>

²⁷ Lihat <https://en.tempo.co/read/1347542/west-papuan-activists-arrested-for-slander-against-police-chief>

²⁸ Lihat <https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/21054751/seorang-warga-tewas-ditembak-kkb-kapolda-papua-pelaku-mengaku-tentara-hutan>

²⁹ Lihat <http://teropongnews.com/berita/nama-gubernur-pb-disebut-dalam-dakwaan-ws-ini-langkah-tim-hukum/>

³⁰ Lihat <http://teropongnews.com/berita/nama-gubernur-pb-disebut-dalam-dakwaan-ws-ini-langkah-tim-hukum/>

'kerekayasaan' pihak penyelenggara pertemuan itu. Mereka divonis 8 bulan dan 15 hari. Jumlah ini pas sama dengan waktu mereka sudah ditahan dalam penjara sambil menunggu dan menjalankan proses pengadilan. Maka sekarang mereka bebas tanpa syarat³¹.

27. Ternyata ada tekanan besar oleh pemerintah pusat untuk 'menormalkan' kembali suasana hidup di Indonesia³². Bagaimana persis isinya masih sedang dirumuskan dalam detilnya. Pokoknya: mulai tanggal 1 Juni sebagian besar Republik dinyatakan "dapat menerapkan kebijakan 'new normal' (normal baru)". Termasuk sejumlah kabupaten di Papua dan Papua Barat. Provinsi Papua, 17 Kabupaten, yaitu: Memberamo Raya, Kepulauan Yapen, Supiori, Mappi, Asmat, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Puncak, Dogiyai, Paniai, Deiyai dan Intan Jaya. Provinsi Papua Barat: Tamberauw, Sorong Selatan, Maybrat, Kaimana dan Pegunungan Arfak. Aktivitas normal atau kegiatan aman Covid-19 itu dapat diterapkan oleh pemimpin setiap daerah dengan memperhatikan ketentuan [1] tes masif, [2] tracing/pelacakan agresif, [3] isolasi ketat, dan [4] perawatan yang menyembuhkan³³. Ditekankan bahwa otoritas lokal perlu menyelenggarakan diri dengan baik untuk mengawasi segala perkembangan dan bertindak, misalkan tutup kembali, kalau ada tanda bahwa wabah Covid-19 berkembang buruk. Pemerintah setempat diberikan tugas berat, dan haraplah ada peluang serta kapasitas tersedia di masing-masing daerah untuk memenuhi tanggungjawab ini dengan baik. Ternyata untuk wilayah seperti Jayapura, Timika, Merauke serta wilayah disekitarnya belum diizinkan menerapkan 'normal baru' itu. Sepintas lalu perlu dicatat bahwa nama 'normal baru' agak berbau 'orde baru' (nama periode pemerintahan Suharto). Mungkin karena itu pemerintah pusat terus memakai bahasa inggris 'new normal'. Pokoknya: untuk suatu nama yang lebih enak kedengarannya kita masih perlu menunggu inspirasi lebih kreatif di tingkat pemerintah pusat....
28. Update Covid-19 31 Mei 2020 di Provinsi Papua menunjukkan perkembangan selama dua minggu terakhir ini sbb: Kasus Positif 815, Perawatan 584, Sembuh 219, Meninggal 12, PDP 772, ODP 2.916, Tes PCR 5.040³⁴. Rinciannya dibawah ini dan beberapa catatan:

Covid-19 31 Mei 2020	Jml Positif	Jml Dirawat	Jml Sembuh	Jml Meninggal	ODP	PDP
Kota Jayapura	355	307	42	6	721	48
Kab Mimika	272	174	93	5	1.309	37
Kab Jayapura	72	39	32	1	187	40
Kab Biak Numfor	40	33	7	0	17	11
Kab Nabire	19	10	9	0	12	0
Kab Keerom	16	5	11	0	79	605
Kab Merauke	14	2	12	0	37	3
Kab Boven Digoel	8	7	1	0	59	1
Kab Jayawijaya	9	4	5	0	40	0
Kab Sarmi	4	1	3	0	2	0
Kab Mambera- mo Tengah	2	0	2	0	0	0
Kab Superiori	2	2	0	0	97	0
Kab Waropen	1	1	0	0	13	0
Kep. Yapen	1	1	0	0	10	0
Total	815	584 = 72%	219 = 27%	12 = 1.5%		
ODP	2.916	PDP	772	Tes PCR 5.040		

³¹ Lihat <https://jubi.co.id/empat-terdakwa-makar-di-sorong-papua-barat-divonis-8-bulan-15-hari-penjara/>

³² Lihat <https://www.jpnn.com/news/tanggapan-din-syamsuddin-soal-new-normal-menyejukkan> dan <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/31/06381421/mahfud-md-klaim-new-normal-tak-diterapkan-dengan-pendekatan-ekonomi-semata>

³³ Lihat <https://jubi.co.id/17-kabupaten-di-papua-dan-5-kabupaten-di-papua-barat-diizinkan-new-normal/>

³⁴ Info Grafis, 31 Mei 2020, 17.00WIT, Provinsi Papua

Sejumlah catatan sekitar perkembangan berkaitan dengan Covid-19:

Selama dua minggu terakhir jumlah Covid positif naik dari 436 ke 815; yang dirawat dari 323 ke 584; yang sembuh dari 106 ke 219; yang mati dari 7 ke 12. Suatu perubahan yang sangat signifikan, karena kenaikan sekitar hampir 100% dalam 2 minggu saja. Sedangkan jumlah tes naik 60%, dari 2.959 menjadi 5.040. Selama pembatasan operasional angkutan darat, lebih-lebih di wilayah Intan Jaya, Paniai, Dogiyai, Dieyai, Nabire, sudah mulai ada gejala bahwa bahan di kios di pedalaman mulai kosong. Akibatnya orang tidak dapat memenuhi kebutuhan harian secara layak, sedang bahan makanan, produksi setempat, lebih-lebih artikel seperti ayam (Rp 200 sampai 300.000 seekor), harga meloncat secara cukup luarbiasa³⁵. Sudah tentu suasana Covid-19 membuat banyak orang susah mencari nafkah, karena kehilangan peluang kerja dsb. Namun ada juga yang merasa 'diuntungkan'. Peribahasanya: "*Rejeki elang tak akan dapat [dimakan] musang*". Dari penjual di Pasar Dok IX dapat dicatat bahwa sekarang dia dapat menjual sagu dan bumbu campur sampai pendapatannya sekitar 600.000 sehari, malahan kadang-kadang sampai 1 juta. Penjualan antara jam 06.00 sampai jam 14.00, dan paling ramai pada pagi hari dan menjelang batas penjualan jam 14.00³⁶. Dalam rapat Forkopimda bersama Pemerintah Provinsi Papua 21 Mei 2020³⁷ ditetapkan [1] PSDD (Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat) diperpanjang hingga 4 Juni. [2] Juga kebijakan masa bekerja dan belajar dari rumah serta pembatasan aktifitas masyarakat sampai jam 14.00 dipertahankan sampai 4 Juni. [3] pelaksanaan salat Idulfitri di rumah masing-masing. [4] Pasar Ikan Hamadi kembali beroperasi mulai Jumaat 22 Mei. Pernah ditutup sejak 12 Mei. Menurut info terakhir di propinsi Papua terdapat 26 tenaga medis yang terkena corona virus³⁸. Diantaranya adalah dokter maupun petugas laboratorium. Sebagian sekarang masih dirawat. Wali kota Sorong, provinsi Papua Barat, sudah mengizinkan pemakaian gedung ibadah lagi³⁹. Jumlah kasus di kota Sorong baru ini sudah naik sampai di atas 50. PT Freeport menyediakan suatu laboratorium rujukan di Kuala Kencana (Mimika) guna membantu pelayanan medis selama krisis Corona. Laboratorium itu juga memiliki kemampuan memeriksa 'swab test' maka tidak perlu lagi mengirim sampel ke Jayapura untuk diperiksa lantas menunggu hasil selama 7 hari. Dengan fasilitas baru ini hasil 'swab test' lebih cepat diketahui⁴⁰.

³⁵ Lihat <https://suarapapua.com/2020/05/19/barang-dagangan-di-paniai-terjual-habis/>

³⁶ Lihat <https://jubi.co.id/korona-menambah-rejeki-penjual-sagu-dan-bumbu-dapur/>

³⁷ Lihat Cepas, 22 Mei 2020, hlm 1

³⁸ Lihat <https://en.antaraneews.com/news/149185/26-medical-workers-in-papua-exposed-to-covid-19>

³⁹ Lihat <http://teropongnews.com/berita/wali-kota-sorong-ijikan-semua-umat-beragama-kembali-beribadah-di-rumah-ibadah/>

⁴⁰ Lihat <https://seputarpapua.com/view/pt-freeport-indonesia-buka-laboratorium-rujukan-diagnosis-covid-19-untuk-papua.html>

Peranan TNI sebagai ‘penegak hukum’

Selama minggu-minggu terakhir ini berulang kali Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI tangani terorisme, diangkat dan dikecam⁴¹. Perpres ini, yang awal Mei diserahkan kepada DPR untuk disahkan, sudah kami angkat dalam laporan Mei, Bagian 1, dibawah butir 14. Kritik yang pokok terumus disitu oleh Julius Ibrani, Koordinator PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia) di Jakarta, sebagai berikut: “...*masalah yang bisa timbul jika Perpres ini sah adalah militer bisa mengambil alih tugas penegakan hukum. Padahal hakikat dibentuknya TNI adalah sebagai alat pertahanan Negara yang dilatih untuk menghadapi perang. Bukan untuk penegakan hukum*”. Dalam beberapa kritikan baru ini pokok yang sama terus diangkat: ***TNI jangan diberikan tugas dalam soal penegakan hukum, itu bukan bidangnya. TNI hanya bisa diminta membantu kalau perlu dan itu dengan seizin pengadilan, dan tidak boleh menjadi aktor di bidang penegakan hukum.*** Ternyata isi rancangan Perpres itu mengabaikan prinsip sangat penting ini⁴².

Diskusi ini sangat menarik, karena kami di Papua sudah biasa sekali dengan mendengar Kapolda maupun Pangdam selalu mengangkat bahwa mereka entah polisi entah tentara beroperasi dalam kerangka ‘penegakan hukum’. Ternyata pemahaman demikian tidak selalu tepat. Bagi Kapolda boleh saja bahwa bahasa itu tepat, namun ternyata buat seorang Pangdam tidak. TNI hanya dapat membantu kalau diminta dan seizin pengadilan. Pangdam diharapkan tidak bertindak secara mandiri dalam bidang penegakan hukum itu, karena bertentangan dengan UU TNI. Kesadaran ini cukup membingungkan, karena begitu sering kami, masyarakat biasa, diberitahukan bahwa semuanya baik operasi militer dan operasi polisi adalah dalam rangka ‘penegakan hukum’. Unsur ‘penegakan hukum’ dijadikan legitimasi banyak tindakan, termasuk tindakan yang langsung dijalankan oleh TNI. Legitimasi demikian ternyata patut dipertanyakan.

Apalagi dengan adanya formula ‘pasukan gabungan’ situasi masih menjadi lebih kabur lagi. Apakah ciptaan ‘pasukan gabungan’, ciptaan dari mantan Kapolri, Tito Karnavian, yang berjumlah sekitar 1.500 anggota di wilayah Timika, merupakan sesuatu yang sah dan sesuai dengan UU yang sedang berlaku? Seingat kami pemisahan TNI dan POLRI diperjuangkan akhir tahun 90-an abad lalu dan menjadi salah satu unsur reformasi yang diperjuangkan dan ditetapkan tahun 1998. ***Apakah kita sekarang kembali pada suasana sebelum Reformasi itu, alias suasana Orde Baru?***

Sama pertanyaannya berhubungan dengan butir [10] dalam laporan ini yang menyangkut SK Menkopolhukam, Mahfud MD, dimana Kapolda Papua diangkat sebagai Kaops (kepala operasi) Penegakan Hukum di Provinsi Papua dan Pangdam XVII/Cendrawasih diangkat menjadi Wakil Kaops Penegakan Hukum di Papua⁴³. ***Apakah SK Menkopolhukam ini sesuai dengan UU TNI yang sedang berlaku?***

Jayapura, 2 Juni 2020
Theo van den Broek

⁴¹ Lihat <https://www.jpnn.com/news/draf-perpres-tni-bisa-membingungkan-dalam-penegakan-hukum-kasus-terorisme> dan <https://nasional.sindonews.com/read/49915/14/ubah-citra-positif-perpres-pelibatan-tni-atasi-terorisme-harus-dicabut-1590660315>

⁴² Lihat <https://nasional.sindonews.com/read/50590/14/jokowi-diminta-tak-tandatangani-perpres-pelibatan-tni-atasi-terorisme-1590707107>

⁴³ Lihat Cepos, 22 Mei 2020, hlm 5 *Ke Mimika, Kapolda dan Pangdam Cek Situasi Keamanan*.